KONSEP NEGARA MENURUT AYATULLAH KHOMEINI DAN ABDURRAHMAN WAHID

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Filsafat Islam
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh:
AGUS REYNALDI
96512089

JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

ABSTRAK

AGUS REYNALDI – NIM. 96512089 KONSEP NEGARA MENURUT AYATULLAH KHOMEINI DAN ABDURRAHMAN WAHID: IAIN SUNAN KALIJAGA, FAKULTAS USHULUDDIN, 2003

Dalam sejarah revolusi Iran, kondisi sosio –politik- religious inilah yang melatar belakangi kehidupan politik Ayatullah Khomeini. Ideologi Syi'ah yang menekankan persoalan keagamaan harus beriringan dengan kehidupan politik masyarakat menjadi dominasi dalam kehidupan umat Syi'ah di Iran. Slogan – slogan tentang pembelaan terhadap kaum tertindas menjadi symbol efektif dalam revolusi Islam Iran. Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang pemerintahan Islam dikenal dengan konsep Wilayatul Faqih, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang mengetahui semua aturan- aturan Allah SWT. Berbeda dengan Abdurrahman Wahid yang secara tegas menolak agama sebagai ideology Negara. Islam semestinya lebih diimplementasikan sebagai sebuah etika social atau system nilai moral yang berarti Islam sebagai komplementer dalam kehidupan Negara.

Obyek dalam penelitian ini adalah Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid tentang konsep Negara, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian historis factual, dengan bersumber dari buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian. Metode yang digunakan melalui deskriptif, interpretasi dan komparasi.

Menurut Ayatullah Khomeini Islam tidak sekedar berfungsi sebagai etika masyarakat, namun juga sebagai agama politik. Karena itu diperlukan sebuah Negara Islam dengan faqih atau ulama sebagai sebagai pemegang kekuasaan. Sedang menurut Abdurrahman Wahid bahwa negara dan agama tidak dapat disatukan, karena fungsi agama dalam negara sebagai etika social. Pandangan Abdurrahman Wahid ini bersandar pada khasanah intelektual sunni yang mengikuti paham ahlussunnah wal jama'ah Keduanya sama sama berpendapat bahwa keberadaan negara harus menjamin adanya keadilan dan persamaan kedudukan tanpa merugikan pihak lain terutama kalangan minoritas bawah.

Kata kunci: **agama, negara, Ayatullah Khomeini, Abdurrahman Wahid**

DRS. H. ABDUL KHALIQ MUCHTAR

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lampiran:6 Eksemplar Skripsi
Skripsi
Saudara Agus Reynaldi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara:

Nama	:	Agus Reynaldi
Nim	:	96512089
Fakultas	:	Ushuluddin
Judul Skripsi	:	Konsep negara menurut Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Sekian dan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2003
Pembimbing I

Drs.H.Abdul Khaliq Muchtar
NIP : 150017907

DRS. INDAL ABROR, M.AG

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lampiran: 6 Eksemplar Skripsi
Skripsi
Saudara Agus Reynaldi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara:

Nama	:	Agus Reynaldi
Nim	:	96512089
Fakultas	:	Ushuluddin
Judul Skripsi	:	Konsep negara menurut Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Sekian dan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2003
Pembimbing II

Drs. Indal Abror M.AG
NIP : 150259420

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/698/2003

Skripsi dengan judul: **Konsep Negara Menurut Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid**

Diajukan oleh :

1. Nama : Agus Reynaldi
2. NIM : 96512089
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Jum`at, tanggal: 11 April 2003 dengan nilai: **75 (B)** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. H. Muzairi, MA	Drs. Rahmat Fajri
NIP. 150215586	NIP. 150275041
Pembimbing/merangkap Penguji	Pembantu Pembimbing
Drs. H.A. Chaliq Muchtar	Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150017907	NIP. 150259420
Penguji I	Penguji II
Drs.H.M.Achmadi Anwar,MM	Shofiyullah, MZ., M.Ag
NIP. 150058705	NIP. 150299964

Yogyakarta, 11 April 2003

D E K A N

Dr. Dlam annuri, MA

NIP. 150182860

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang rela berkorban demi penegakkan agama Islam.

Setelah lama menjalani studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi sebagai tugas akhir dari kampus IAIN. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Akidah Filsafat dalam Ilmu Ushuluddin.

Selanjutnya penulis menghaturkan ribuan terima kasih kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga beserta stafnya. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan segenap stafnya. Kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan Akidah Filsafat. Kepada Dosen Penasehat Akademik dan para dosen lainnya yang sekian lama mencurahkan ilmu-ilmunya dan mengasah intelektualitas pada penulis.

Tak lupa terima kasih kepada dosen pembimbing, Drs. H.A. Chaliq Muchtar dan Drs. Indal Abror, MAg yang telah memberikan komentar maupun kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kepada Ayahanda dan Ibunda yang selalu tabah menyertai penulis diiringi dengan ketulusan do`anya sehingga memberikan dorongan moril yang kuat untuk menyelesaikan amanat ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Ismulyadi yang kerap memberikan masukan maupun kritik-kritiknya. Kepada Betty yang selalu menyertai diri penulis, kepada Eman dan Enny yang bersedia meminjamkan sarana pengetikan, Darwan yang memberikan masukan-masukan, dan teman-teman kost yang memberikan bantuan yang tidak sedikit.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 15 Maret 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN NOTA DINAS.....ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
HALAMAN MOTTO.....v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....ix

BAB I. PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....14
B. Rumusan Masalah.....15
C. Maksud dan Tujuan Penulisan.....15
D. Tinjauan Pustaka.....15
E. Metode Penelitian.....18
F. Sistematika Penulisan.....21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA.....23
A. Pengertian Negara.....23
B. Negara Dalam Wacana Filsafat.....28
C. Hubungan Negara dan Agama.....58

BAB III AYATULLAH KHOMEINI DAN ABDURRAHMAN WAHID.....67
A. Biografi dan pemikiran Ayatullah Khomeini Tentang Negara.....67
1. Biografi Ayatullah Khomeini.....67
2. Karya-karya Ayatullah Khomeini.....79

3. Pemikiran Ayatullah Khomeini Tentang Negara.....81
B. Biografi dan Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Negara.....103
1. Biografi Abdurrahman Wahid.....103
2. Karya-Karya Abdurrahman Wahid.....108
3. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Negara.....110

BAB IV PEMIKIRAN TENTANG KONSEP NEGARA: AYATULLAH KHOMEINI DAN ABDURRAHMAN WAHID.....131
1. Perbedaan.....131
2. Persamaan.....141
3. Kritik Terhadap Pemikiran Negara Menurut Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid.....151

BAB V PENUTUP.....145
1. Kesimpulan.....145
2. Saran-Saran.....147

DAFTAR PUSTAKA.....I
A. Catatan Tentang Penyusun.....V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah sekumpulan manusia yang secara tetap mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki institusi abstrak sendiri serta sistem yang dipatuhi dari para pemegang kekuasaan serta memiliki kemerdekaan politik.[1)] Lebih ekstrimnya, bagi penganut fasisme, negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara bahkan dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masyarakat.[2)]

Menurut Aristoteles, negara atau asosiasi politik lahir melalui satu proses alamiah dan perkembangan yang diperlukan dalam hidup manusia. Negara merupakan bentuk tertinggi dalam jenjang yang evolusioner. Dalam negara

---

[1)] M.Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, terj. M.Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlas, tanpa tahun), hlm.25.

[2)] Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.3.

itu pula hakekat moral manusia terbentuk dalam sifat-sifatnya yang khusus dan mencapai bentuknya yang tertinggi.[3)]

Dalam setiap kajian politik klasik dan kontemporer, kajian tentang negara dan demokrasi pasti ditemui. Karena negara merupakan suatu "badan" yang memiliki otoritas tertinggi sebagai kekuatan politik penentu dinamika sosio-politik dalam sebuah masyarakat, sehingga ia menjadi kajian analisis yang sangat menarik sekaligus amat penting.

Menurut filosof klasik, Socrates, sifat negara dapat dibedakan dalam beberapa tipe. *Pertama*, aristokrasi, yaitu sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja atau filosof yang memiliki keistimewaan dalam intelektualitas, kekuasaaan, kemuliaan dan kewibawaan. *Kedua*, adalah timokrasi; sebuah negara yang dipimpin oleh seorang prajurit yang ksatria. *Ketiga*, oligarkhi, yakni sebuah negara yang dipimpin oleh sekelompok kecil masyarakat dari kalangan saudagar dan pengusaha. Yang *keempat* adalah

---

[3)] Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.39.

negara yang bersifat demokrasi; di mana sebuah negara memiliki kekuasaan tertinggi berada pada masyarakat banyak.[4]

Adapun dalam praktek penyelenggaraan negara paling tidak terdapat dua bentuk yaitu; *pertama*, negara agama (teokrasi): yakni negara yang menjadikan agama sebagai dasar pemerintahannya. Sedangkan yang *kedua* adalah bentuk negara sekuler: yaitu negara yang memisahkan antara urusan negara dan urusan agama.[5]

Ketika agama mencoba ikut berbaur dalam wacana negara, ia cukup banyak menyita perhatian orang karena berbagai polemik yang dilahirkannya. Dalam Islam misalnya, sejak dahulu wacana negara, Islam dan demokrasi menjadi satu perbincangan yang hangat di kalangan para pemikir Islam. Ibnu Khaldun contohnya, baginya, kekuasaan

---

[4] Muhammad Azhar, *Filsafat Politik*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1997), hlm. 23.

[5] Farid, *Formulasi Nuansa Religius Bangsa dalam Praktek Penyelenggaraan Negara*, (Yogyakarta: Jurnal Filsafat, 1994), hlm.46. Lihat juga H.Z.A. Ahmad dalam *Negara Utama: Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam Al-Farabi*, (Jakarta: Djambatan, 1964), hlm.88-89.

syari`ah (Islam) tidak dapat dipisahkan dari masalah negara.[6)]

Sementara itu, Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa mendirikan sebuah negara adalah kewajiban agama, karena agama tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa didukung oleh negara. Tidak jauh berbeda dengan Ibnu Taimiyyah, Al-Mawardi pun menyatakan bahwa mendirikan sebuah negara merupakan kewajiban umat berdasarkan perintah agama.[7)]

Selain itu, para pemikir Islam kontemporer yang tidak kalah besar perhatiannya terhadap wacana negara di antaranya adalah Maulana Al-Maududi. Menurut Maulana Al-Maududi, negara Islam sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan Tuhan adalah penguasa tunggal dunia, maka tidak seorang pun yang berhak dunia mengatur kecuali Dia. Hanya ada satu cara yang benar yakni seorang khalifah harus memerintah selaku wakil-Nya sesuai dengan syari`ah yang meliputi Al-Qur`an dan Hadits. Setiap pemerintahan yang tidak berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah Rasul adalah

---

[6)] Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm.162.

[7)] Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.41.

tidak sah. Rakyat tidak berhak memiliki kedaulatan, yang ada melainkan hanyalah kedaulatan Tuhan.[8)]

Dalam khazanah pemikiran keislaman, wacana seputar negara ini semakin menarik lagi ketika dikaitkan pada pandangan aliran keagamaan besar dalam Islam yaitu antara aliran Syi'ah dan Sunni yang dalam aspek historis selalu dalam posisi berhadapan (kontra).

Polemik tentang negara ini pun tidak luput dari pengamatan Ayatullah Khomeini, seorang tokoh kharismatik revolusi besar Islam Iran, 1978-1979. demikian pula dengan Abdurrahman Wahid, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang juga salah satu tokoh NU yang terkenal dan sempat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Kedua tokoh ini, selain berposisi sebagai seorang ulama yang acapkali mengeluarkan fatwa atau nasehat kepada umatnya, pemikirannya tentang konsep negara juga cukup menarik dan banyak menghiasi khazanah perbendaharaan pemikiran intelektual Islam.

[8)] Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.199-217. Atas dasar pandangannya tentang negara seperti ini kemudian lahirlah pemikiran Teo-demokrasi Maududi. Bagi Al-Maududi, di dalam pemerintahan Islam kaum muslimin diberikan kedaulatan rakyat yang terbatas dibawah naungan kedaulatan Tuhan.

Dalam aliran Islam Syi`ah,[9] dengan tersingkirnya keluarga Nabi Muhammad SAW dalam persoalan kehidupan bermasyarakat pasca Rasulullah serta berakhirnya kepemimpinan Ali sebagai khalifah terakhir yang dikarenakan pembunuhan oleh Ibn Muljam telah menumbuhkan kesadaran politik yang kuat dalam diri pengikut Ali. Terlebih lagi manakala terjadi tragedi Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah (12 Oktober 680 M) di mana Husein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah yang dijadikan sebagai Imam ketiga Syi`ah Imamiah beserta 72

---

[9] Sebuah kelompok Islam yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thaliblah yang berhak untuk dijadikan sebagai pengganti Rasulullah sekaligus pemimpin Islam. Lihat Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Iran,* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm.42. Hal ini tersirat dengan adanya penunjukkan Ali sebagai Khalifah ketika Nabi SAW melancarkan perang *Tabuk* serta peristiwa di Ghadir Khaum, ketika Rasulullah beristirahat setelah mengadakan perjalanan dalam haji Wada`, nabi menyatakan :"Inilah saudaraku (Ali), wasiatku, khalifahku untukmu dan dengarkan dan taati dia", (Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif,* (Bandung: Mizan,1995), hlm.244.). Secara historis, adanya kelompok Syi`ah ini tidaklah terlepas dari peristiwa Saqifah yaitu balai pertemuan di Madinah di mana para sahabat menggunakannya untuk melakukan diskusi tentang problematika kehidupan yang dihadapi. Di sana kaum Muhajirin memaksakan kehendaknya kepada kaum Anshor untuk memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasul. Dalam pertemuan di Saqifah inilah dimulainya perpecahan kaum muslimin dengan sebagian suara mendukung Ali sebagai Khalifah. (S.H.M Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah,* Peng. Nurcholish Madjid, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990), hlm.57-58). Di Saqifah inilah Abu Bakar terpilih sebagai Khalifah pengganti Rasulullah. Hal ini bukan berarti telah menyelesaikan perpecahan di antara kaum muslimin. Ali bersama empat pilar pembentuk Syi`ah yaitu Ammar bin Yasir, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar bin Jundab Al Ghiffari, dan Salman Al Farisi serta Fathimah putri nabi tidaklah ikut memberikan baiatnya kepada Abu Bakar. (S.H.M Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah,* Peng.Nurcholish Madjid, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990), hlm.81-94.).

Pengikutnya mati syahid dibunuh secara kejam oleh pasukan Yazid bin Muawwiyah bin Abi Sofyan membawa luka mendalam bagi kalangan Syi`ah dan umat Islam seluruhnya. Tragedi terbesar yang terjadi di mana cucu dari manusia pilihan Tuhan terakhir terbunuh oleh sekelompok orang yang haus kekuasaan yang ironisnya mengaku sebagai pengikut Nabi SAW. Karenanya bagi Syi`ah tidak ada pemisahan antara politik dan agama sebab keduanya menyatu sebagai bagian dari ritual keagamaan. Bahkan hampir seluruh ajaran Syi`ah memunculkan hubungan yang erat antara dimensi ibadah dan politik.[10)]

Dalam sejarah revolusi Iran, kondisi sosio-politik-religius inilah yang melatarbelakangi kehidupan politik Ayatullah Khomeini. Ideologi Syi`ah yang menekankan persoalan keagamaan harus beriringan dengan kehidupan politik masyarakat menjadi dominasi dalam kehidupan umat Syi`ah di Iran. Slogan-slogan tentang pembelaan terhadap

---

[10)] Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.18-24.

kaum tertindas menjadi simbol efektif dalam revolusi Islam Iran.[11)]

Menurut Richard Fack, seorang profesor dari Universitas Princeton, AS (ketua US People`s Committee On Iran) sebuah organisasi yang bertujuan menyadarkan masyarakat Amerika tentang bahayanya campur tangan AS di Iran, mengatakan ada tiga hal yang menimbulkan perlawanan rakyat Iran terhadap pemerintah Iran yang dipimpin Syah Pahlevi yakni:

> *Pertama,* karena cara pemerintahan yang secara sistematis menggunakan penindasan yang sangat kejam termasuk penganiayaan terhadap anak-anak dari golongan menengah yang secara tradisi memiliki dasar kekuatan yang besar dalam masyarakat.
> *Kedua,* tingkat korupsi yang dilakukan oleh keluarga Syah dan kroni-kroninya. Satu hal yang sangat menjengkelkan rakyat kecil di Iran ialah kenyataan bahwa kekayaan masuk ke dalam negara dari hasil ekspor minyak namun nasib mereka tidak menjadi lebih baik.
> *Ketiga,* gaya pemerintahan serta penentuan prioritas yang dianggap terlalu berorientasi pada model barat

---

[11)] Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif,* (Bandung: Mizan, 1995), hlm.244.

dengan memasukkan penganut asing yang sebagian besar dari AS.[12)]

Atas dasar inilah tujuan gerakan Ayatullah Khomeini dalam menuntut keadilan sosial, pembagian kekayaan yang adil, ekonomi yang produktif berdasarkan pada kebutuhan nasional dan gaya hidup yang sederhana serta pemberantasan korupsi yang mengurangi jurang perbedaan antara kaya dan miskin antara yang memerintah dan diperintah.[13)]

Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang pemerintahan Islam dikenal dengan konsep *Wilayatul Faqih,* yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang mengetahui semua aturan-aturan Allah SWT. Bagi Khomeini, pembuktian mengenai *Wilayatul Faqih* karena alasan-alasan sejarah yang meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya adalah bahwa Islam sejak semula telah menghadapi serangan dan propaganda anti Islam dari orang-orang Yahudi, diikuti oleh kaum Imperialis dan kaki tangannya. Sedangkan faktor internalnya adalah adanya

---

[12)] Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan Ayatullah Khomeini,* (Jakarta: Pustaka Antara, 1979), hlm.47-48.

[13)] *Ibid.,* hlm.49.

kekurangan rasa percaya diri dari kaum muslimin terutama sebagai akibat dari kemajuan iptek serta perampokan kekayaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika.[14)]

Menurut Ayatullah Khomeini, bentuk pemerintahan Islam yang ideal adalah seperti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Ali yang tunduk pada hukum Islam yang berasal dari Tuhan dan bukan dari hukum yang dibuat rakyat atau para wakilnya. Maka tidak heran jika Barat berpandangan bahwa hukum Khomeini ingin membawa Iran kembali ke abad 7 Masehi.[15)] Hal ini diperkuat dengan keyakinan Khomeini bahwa dalam ketiadaan pemerintahan negara Islam, sistem politik Islam niscaya akan lenyap.[16)]

Adapun kaum Sunni, secara konseptual menyatakan tidak ada pemisahan antara agama dan politik karena keduanya merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun pada kenyataannya terkadang tampak terjadi pemisahan. Agama telah menjadi urusan kaum

---

[14)] Salim Azzam, (ed.), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam,* terj. Mahlul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan, 1990), hlm.115-121.

[15)] Riza Sihbudi, *op. cit.*, hlm.115.

[16)] A.Ezzati, *Gerakan Islam,* terj. Agung Sulistyadi, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990), hlm.111.

rohaniawan ulama sedangkan politik menjadi urusan negarawan politik.[17)]

Di Indonesia umpamanya. Kendati pun mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Islam Sunni namun perdebatan seputar wacana negara (negara Islam) masih cukup membuat para cendekiawannya harus terus memeras otaknya. Bagi Amin Rais, misalnya, menurut dia, tidak ada di dalam Al-Qur`an maupun Sunnah Rasul tentang sebuah negara Islam. Yang terpenting baginya adalah selama suatu negara menjalankan etos Islam, menegakkan keadilan sosial, dan menciptakan suatu masyarakat yang

---

[17)] Riza Sihbudi, *op. cit.*, hlm.17. Perintis aliran Sunni ialah Hasan Al-Bashri dan kemudian pemikiran Sunni benar-benar mapan ketika dipelopori oleh empat imam mazhab terkemuka yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi`i, dan Ahmad bin Hambal, meskipun keempat imam ini tidaklah mengklaim sebagai bagian dari kelompok Sunni. Adapun Al-Ghazali adalah seorang tokoh yang berpegang pada paham Asy-Syafi`i yang kembali mengokohkan paham Sunni yang merupakan tonggak konsolidasi terakhir paham Sunni. (Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban,* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm.172.). Pemikiran politik Sunni mengalami perkembangan pada masa dinasti Abbasiah yang memiliki perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan termasuk ilmu politik. Pengaruh pemikiran Yunani begitu kental. Transiasi karya-karya intelektual Yunani ke dalam bahasa Arab menimbulkan hasrat yang besar dari para ilmuwan Islam untuk mempelajari masalah-masalah negara secara rasional. Karenanya banyak pemikir Islam Sunni yang mengeluarkan gagasan-gagasan politiknya seperti antara lain Al Farabi (w. 950 M), Al-Ghazali (w. 1111 M), Ibnu Taimiyyah (w. 1329 M) dan Ibnu Khaldun (w. 1406 M). Baik Ibnu Taimiyyah maupun Al-Mawardi sama-sama berpandangan bahwa negara merupakan kewajiban umat dan agama karena tanpa sebuah kekuasaan negara agama takkan berfungsi secara optimal. (Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.41.).

egalitarian, tidak ada artinya suatu negara menggunakan Islam sebagai dasar negara kalau sekedar untuk formalitas belaka.[18)]

Demikian juga bagi Muhammad Roem, seorang tokoh politik Indonesia dan politisi dari Masyumi yang wafat pada tanggal 24 September 1983. Muhammad Roem sepakat dengan Amin Rais bahwa tidaklah dikenal adanya istilah negara Islam. Bagi Muhammad Roem, konsep kemasyarakatan dan politik telah mencapai kesempurnaan pada masa akhir Rasulullah hingga wafatnya beliau dalam jangka tidak lebih dari sekitar tiga bulan. Setelah itu tidak ada lagi yang mampu menyamai kepemimpinan Nabi.[19)]

Tidak berbeda jauh dengan para tokoh cendekiawan Islam Indonesia sebagaimana yang disebutkan di atas, Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa tidak ada negara Islam. Menurutnya, andaikata Nabi Muhammad menginginkan berdirinya sebuah negara Islam, maka suksesi kepemimpinannya harus dirumuskan secara formal. Sedangkan

---

[18)] Lihat Amin Rais, *"Tidak Ada Negara Islam"*, dalam Nurcholish Madjid, *Surat-surat Politik Nurcholish-Muhammad Roem*, peny. Agus Edi Santoso, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm.XXIII.

[19)] Muhammad Roem, *"Tidak Ada Negara Islam"*, dalam Nurcholish Madjid, *Surat-surat Politik Nurcholish-Muhammad Roem*, peny. Agus Edi Santoso, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm.7.

nabi cuma memerintahkan "bermusyawarahlah kalian dengan persoalan.[20]

Abdurrahman Wahid secara tegas menolak agama sebagai ideologi negara. Menurut dia, dalam sebuah negara pluralis, menjadikan Islam atau agama lain sebagai ideologi negara hanyalah akan memicu munculnya masalah disintegrasi yang berbasis pada sektarianisme. Islam seharusnya lebih diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial atau sistem nilai moral yang berarti Islam sebagai komplementer dalam kehidupan negara.[21]

Demokrasi menjadi keharusan karena demokrasi memungkinkan terbentuknya sebuah pola relasi politik yang seimbang serta mendukung pluralisme bangsa. Bagi Abdurrahman Wahid, tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya pada dataran pola hidup berdampingan secara damai, melainkan lebih dari itu penghargaan terhadap pluralisme akan melahirkan kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara ikhlas sehingga satu kelompok dengan kelompok lain dapat menerapkan pola *"take and give"*.

---

[20] Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tak Perlu diBela*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm.16.

[21] Umaruddin Masdar, *op. cit.*, hlm.129.

Karena salah satu substansi demokrasi adalah kebebasan untuk saling memberi dan menerima.[22)]

Lebih lanjut bagi Abdurrahman Wahid kedaulatan hukum merupakan kunci tegaknya hak asasi manusia. Kedaulatan hukum itu sendiri memerlukan pelaksanaan atas kebebasan berbicara dan berserikat yang merupakan bagian dari deklarasi universal hak asasi manusia di mana tanpa aplikasi deklarasi itu takkan dapat berdiri sebuah pemerintahan demokratis.[23)]

Berdasarkan paparan-paparan di atas, menelusuri gagasan-gagasan besar tentang konsep negara Ayatullah Khomeini (Islam Syi`ah) dan Abdurrahman Wahid (Islam Sunni) yang terkait dengan pandangan aliran keagamaan yang dimiliki keduanya yang dalam sejarah kerap berada dalam posisi berlawanan menurut penulis adalah sangat menarik untuk dieksplorasi lebih jauh hingga dapat ditarik benang merah pemikiran kedua tokoh tentang negara.

[22)] *Ibid.*, hlm.144-145.

[23)] *Ibid.*, hlm.146.

B. RUMUSAN MASALAH

Pada bagian ini, berangkat dari berbagai pemaparan di atas, sesuai dengan judulnya "Konsep Negara Menurut Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid" yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep negara menurut Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid?
2. Apakah perbedaan dan persamaan konsep negara Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Mengenal konsep negara Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid.
b. Menemukan perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh tentang negara.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pengamatan penulis, telah cukup banyak penelitian yang dilakukan tentang pemikiran Ayatullah Khomeini seperti karya Riza Sihbudi yang berjudul *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Dalam buku ini diperbincangkan aspek-aspek politik yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini dalam revolusi Iran. Tak beda jauh dengan Riza Sihbudi, Yusuf Abdullah Puar dalam bukunya *Biografi Perjuangan Ayatullah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Antara, 1979, juga membicarakan perjuangan dalam pembelaan kaum tertindas yang dilakukan oleh Ayatullah khomeini terhadap rezim Syah Pahlevi. Sementara dalam buku yang berjudul *Pesan Sang Imam*, penyunting Sandy Alison, Bandung: Al-Jawad Publisher, 2000, berisikan kumpulan pandangan maupun wejangan Ayatullah Khomeini tentang banyak hal diantaranya pesan akan pentingnya ulama dalam masyarakat. Sehingga kalau pun ada dirinya berbicara tentang konsep negara namun tidak dijelaskan secara detail. Ada juga karya dari Yamani yang berjudul *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002, mengupas pemikiran politik Al-Farabi dan Khomeini disertai komparasinya. Menurut Yamani, Al-Farabi menyatakan bahwa penguasa adalah filosof-raja yang menguasai kearifan teoritis maupun praktis sehingga mampu mencapai keadaan menyatu dengan akal, sementara Khomeini menyatakan bahwa

faqih adalah orang yang memiliki kekuasaan pemerintahan yang mengetahui hukum dan keadilan.

Begitu pula penelitian terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid telah banyak dilakukan antara lain; buku dengan judul *Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Abdurrahman Wahid dan Amin Rais,* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996, dengan penyunting Arief Affandi yang merupakan kumpulan pendapat para tokoh intelektual Indonesia terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amin Rais. Buku ini menyoroti seputar pandangan Abdurraham Wahid dan Amin Rais terhadap demokrasi. Menurut Arief Affandi, Abdurrahman Wahid memiliki corak strategi perjuangan umat melalui garis bawah. Sedangkan Amin Rais lebih memiliki corak perjuangan garis atas. Selain itu ada pula karya dari Umaruddin Masdar dengan judul *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, mengupas tentang pemikiran kedua tokoh mengenai demokrsi disertai dengan komparasi pandangan antar keduanya. Selain itu ada pula buku yang berjudul *Membangun Demokrasi,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, dengan editor Zaini Shofari Al-Raef dan Andi Taufik H,

merupakan kumpulan pandangan Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. Di dalam buku yang lain berjudul *Prisma Pemikiran Gus Dur,* Yogyakarta: LkiS, 2000, yang merupakan kumpulan dari artikel-artikel yang dibuat Abdurrrahman Wahid di mana pernah dimuat dalam jurnal Prisma.

Dengan memperhatikan tulisan-tulisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan secara filosofis dan khusus tentang negara serta melakukan komparasi antara pemikiran kedua tokoh, Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid, sejauh pengetahuan penulis belum dilakukan. Atas dasar inilah penulis mencoba memfokuskan pembahasan skripsi ini pada konsep negara Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid.

E. METODE PENELITIAN

Sebelum mengulas lebih lanjut pemikiran Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid tentang negara, amatlah penting untuk terlebih dahulu menentukan pendekatan apa yang akan dipakai sebab sebuah metode pendekatan terhadap sebuah persoalan jauh lebih penting daripada materi persoalan itu sendiri. Artinya jika metode pendekatan yang digunakan terhadap suatu masalah tidak tepat, besar kemungkinan substansi persoalan tersebut justru tidak

tersentuh, bahkan boleh jadi terdistorsi.[24] Selain itu adanya metodologi juga merupakan salah satu syarat keilmiahan suatu tulisan. Karenanya untuk memenuhi syarat tersebut dan memudahkan dalam melakukan pembahasan, maka penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Bahan atau Materi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pemikiran dua tokoh yaitu Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid tentang konsep negara. Maka dari itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian historis faktual. Sedangkan materi penelitian ini adalah tulisan-tulisan karya dari Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid tentang negara.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan tulisan skripsi ini digunakan penelitian kepustakaan *(Library Research)* yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, majalah, kamus, serta sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan obyek penelitian.

---

[24] Amin Abdullah, *Studi Agama Normatifitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.61.

3. Tehnik Pengolahan Data

Agar keseluruhan data dapat dipahami dengan jelas, maka dipergunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Deskriptif.

Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah penulis menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh.[25] Di sini pemikiran Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid diuraikan secara konsisten.

b. Interpretasi.

Dalam filsafat, interpretasi berarti menafsirkan pemikiran secara obyektif. Metode ini digunakan untuk memahami dan menyelami data yang terkumpul untuk kemudian menangkap arti dan nuansa yang dimaksud tokoh secara khas.[26] Di sini penulis akan menelusuri pemikiran kedua tokoh sesuai dengan gaya pribadi masing-masing.

c. Komparasi.

Yaitu usaha memperbandingkan sifat hakiki dari dua obyek penelitian yang berbeda, sehingga secara lebih

---

[25] Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.65.

[26] *Ibid.*, hlm.63.

jelas dan tajam dapat diketahui perbedaan dan persamaan sesuatu sehingga hakekat obyek dapat dipahami secara lebih murni.[27] Di sini penulis akan memperbandingkan pemikiran dari kedua tokoh untuk kemudian dicari dn diketahui akan perbedaan dan persamaan pemikiran di antara keduanya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama (BAB I), Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua (BAB II), berisikan perbincangan persoalan seputar negara yang terdiri dari: Pengertian Negara, Negara Dalam Wacana Filsafat, dan Hubungan Negara dan Agama.

Bab ketiga (BAB III), berisikan pengenalan terhadap Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid, yang meliputi:

---

[27] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.47.

Riwayat Hidup, Karya-karya, dan Pemikiran Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid tentang negara.

Bab keempat (BAB IV), berisi pembahasan perbandingan pemikiran antara Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid dengan melihat dari perbedaan dan persamaan yang ada.

Bab kelima (BAB V), merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Ayatullah Khomeini dengan penafsirannya tentang Islam berpandangan bahwa Islam bukan sekedar berfungsi sebagai etika masyarakat, namun juga sebagai agama politik. Islam tidak hanya mengajarkan tentang etika dan ibadah belaka, melainkan juga mengajarkan permasalahan politik. Karena itu diperlukan sebuah negara Islam dengan faqih atau ulama sebagai pemegang kekuasaan. Hal ini dimaklumi karena secara historis Ayatullah Khomeini merupakan pengikut Syi`ah yang tidak mengenal istilah pemisahan negara dan agama. Ayatullah Khomeini juga bersikap negatif terhadap pemikiran dunia barat. Hal ini disebabkan oleh tindakan Syah Pahlevi yang ditunggangi oleh pihak Barat. Berbeda dengan Ayatullah Khomeini, Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa negara dan agama tidak dapat disatukan. Ia lebih melihat fungsi agama dalam negara sebagai

etika sosial. Bilamana agama dijadikan sebagai sebuah ideologi negara, maka akan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia meliputi berbagai penganut agama yang berbeda-beda. Pandangan Abdurrahman Wahid ini bersandarkan pada khazanah intelektual Sunni yang sangat kental karena ia merupakan bagian dari Nadhatul Ulama yang jelas mengikuti paham *Ahlussunnah Wal Jama`ah*. Terhadap pemikiran barat, Abdurrahman Wahid bersikap positif dan apresiatif namun tetap kritis.

2. Baik Ayatullah Khoemini maupun Abdurrahman Wahid sependapat untuk selalu membela kepentingan kaum minoritas bawah yang tertindas. Keduanya sama-sama berpendapat bahwa keberadaan negara harus menjamin adanya keadilan dan persamaan kedudukan tanpa menindas atau merugikan pihak lain terutama kalangan minoritas bawah. Keduanya juga sangat apresiatif terhadap konsep demokrasi. Karena demokrasi dianggap dapat menjamin terciptanya kemerdekaan, keadilan maupun kesejahteraan umum. Namun bagi Ayatullah Khomeini, demokrasi yang berkedaulatan kepada rakyat

tetap tidak bisa menandingi kedaulatan Tuhan. Kedudukan kedaulatan Tuhan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kedaulatan rakyat. Sementara bagi Abdurrahman Wahid demokrasi tetap harus diperjuangkan secara kontinu sebab hanya dengan demokrasi Indonesia dapat menjalani kehidupan berbangsa yang damai dan sejahtera.

2. Saran-saran

Mengingat untuk membongkar pemikiran Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid bukan sebuah pekerjaan yang mudah, termasuk memperbandingkannya, oleh sebab itu penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini memang jauh dari kesempurnaan. Karenanya kritik dan saran Bapak/Ibu dan Saudara/I sangat dibutuhkan dalam rangka pendalaman dan penajaman analisa terhadap persoalan-persoalan seputar negara yang dikemukakan oleh Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman Wahid. *Wassalam.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, *Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Affandi, Arief (peny), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Umat Model Gus Dur dan Amien Rais,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Menurut Fazlurrahman,* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Algar, Hamid dan Carlsen, Robin W., *Mata Air Kecermelangan,* terj. Zainal Abidin, Bandung: Mizan, 1991.

Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam,* terj. Mahlul Awwal dan Abu Jalil, Bandung: Mizan, 1990.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Huda, Volume 2 No. 4, 2001.

Bakker, Anton dan Charris Zubair, Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia, 1991.

Burrell, R.M. (ed), *Fundamentalisme Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi,* Jakarta: Gramedia, 1996.

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi`ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20,* terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1982.

Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam,* Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ezzati, A, *Gerakan Islam,* terj. Agung Sulistyadi, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990.

Esposito, John.L. dan Voll, Hohn.O., *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek,* terj. Rahmi Astuti, Bandung: Mizan, 1997.

Gani, Soelistyati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat I,* Yogyakarta: Kanisius, 1980.

_____, *Sari Sejarah Filsafat Barat II,* Yogyakarta: Kanisius, 1980.

Hatta, Mohammad, *Alam Pikiran Yunani,* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Iran, Kedutaan Republik Islam, *Sekilas Tentang Imam Khomeini,* Jakarta: tanpa tahun.

Khomeini, Ayatullah, *Pesan Sang Imam,* peny. Sandy Alison, Bandung: Al-Jawad Publisher, 2000.

_____, *Jihad Akbar,* terj. Ibrahim Mahmudi, T.P. Yayasan Al-Sajjah, 1991.

_____, *Sistem Pemerintahan Islam,* terj. Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Madjid, Nurcholish, *Tidak Ada Negara Islam, Surat-Surart Politik Nurcholish - Muhammad Roem,* peny. Agus Edi Santoso, Jakarta: Djambatan, 2000.

Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara Dalam Islam,* terj. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, tanpa tahun.

Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat,* Bandung: Mizan, 1997.

Puar, Yusuf Abdullah, *Perjuangan Ayatullah Khomeini,* Jakarta: Pustaka Antara, 1979.

Pratignjo, Imam, *Filsafat Negara,* Jakarta: Empu Tantular, 1960.

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif,* Bandung: Mizan, 1995.

Rahmena, Ali (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam,* Bandung: Mizan, 1995.

Sihbudi, Riza, *Biografi Politik Imam Khomeini,* Jakarta: Gramedia, 1996.

_____, *Dinamika Revolusi Iran,* Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis,* Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Soehino, *Ilmu Negara,* Yogyakarta: Liberti, 1996.

Saleh, Imam Anshori, *Islam, Negara dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur,* (ed). Singgih Agung dan Henry Raymond, Jakarta: Erlangga, 1999.

Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara,* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.

Thabathaba`i, Allamah M.H., *Islam Syi`ah, Asal-Usul dan Perkembangannya,* terj. Djohan Effendi, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Tempo, 27 Januari 1979, "Revolusi Kaum Bazaari".

Wahid, Abdurrahman, *Tuhan Tak Perlu Dibela,* Yogyakarta, LkiS, 1999.

_____, *Prisma Pemikiran Gusdur,* Pengantar Greg Barton dan Hirus Salim HS, Yogyakarta: LkiS, 2000.

_____, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara,* (ed), Kacung Marijan dan Ma`mun Murod Al-Brebesy, Jakarta: PT. Grasindo, 1999.

_____, *Membangun Demokrasi,* (ed). Zaini Shofari Al-Raef dan Andri Taufik H, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

_____, *Tabayyun Gusdur,* Yogyakarta: LkiS, 1998.

Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam,* Bandung: Mizan, 2002.

_____, *Wasiat Sufi Ayatullah Khomeini,* Bandung: Mizan, 2002.

Zada, Khamami, *Islam Radikal,* Jakarta: Teraju, 2002.

Zahrah, Imam Muhammad Abu, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam,* terj. Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Jakarta: Logos, 1996.

Zainuddin, Rahman, Afadlal, Dhuroruddin Mashad, Erni Budiwanti, M. Hamdan Basyar, dan Riza Sihbudi, *Syi`ah dan Politik Indonesia: Sebuah Penelitian,* Bandung: PPW-LIPI dan Mizan, 2000.